

Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi Pada Pt. Perkebunan Nusantara Iv Regional Ii Unit Kebun Bah Birong Ulu

Surya Sanjaya*

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

suryasanjaya@umsu.ac.id

M.Irsan

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

m.irsan@umsu.ac.id

Jamilah Agustina

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

jamilahagustina1408@gmail.com

DOI: DOI: <https://doi.org/10.30596/31384>

ABSTRACT

This study employs a descriptive method with a qualitative approach. Data collection was conducted through interviews and document analysis, utilizing data on production cost budgets and actual expenditures for the 2020–2024 period. The results indicate that the company has implemented responsibility accounting, evidenced by a clear organizational structure, the preparation of production cost budgets, cost classification, cost recording systems, and periodic responsibility reports. However, there remain unutilized production cost budget allocations, with the percentage of unspent funds tending to increase annually. This suggests that budget preparation does not yet fully reflect actual operational conditions, thereby preventing the control function from operating optimally. Overall, responsibility accounting has played a role in supporting production cost control through the processes of planning, execution, and evaluation; however, improvements are still needed, particularly regarding the preparation of more accurate and realistic budgets.

Keyword : Responsibility Accounting, Production Cost Control, Budgeting

Cara Sitasi:

Sanjaya, S., Irsan, M., Agustina, J. (2026). Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi Pada Pt. Perkebunan Nusantara Iv Regional Ii Unit Kebun Bah Birong Ulu, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol 26 No 1 Hal 21-27 DOI: <https://doi.org/10.30596/31384>

PENDAHULUAN

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem akuntansi manajemen yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja setiap unit organisasi berdasarkan tanggung jawab yang diberikan. Sistem ini membagi organisasi ke dalam pusat-pusat pertanggungjawaban seperti pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Menurut (Mulyadi, 2018), akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem akuntansi yang menyajikan informasi biaya dan pendapatan berdasarkan pusat-pusat pertanggungjawaban. Berdasarkan observasi awal pada laporan biaya produksi tahun 2020 hingga 2024, fenomena utama yang ditemukan adalah pada penerapan akuntansi pertanggungjawaban, anggaran

seharusnya berfungsi sebagai tolok ukur kinerja bagi pusat pertanggungjawaban untuk mengendalikan biaya produksi. Namun, berdasarkan laporan biaya produksi di unit kebun Bah Birong Ulu periode 2020-2024, ditemukan fenomena di mana anggaran belum sepenuhnya terserap dengan baik untuk menjalankan fungsi pengendalian tersebut.

Berdasarkan masalah diatas, berikut ini adalah tabel anggaran dan realisasi biaya produksi di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Unit Kebun Bah Birong Ulu adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Tahun 2020,2021,2022,2023,2024

Tahun	RKAP	Realisasi	Selisih Anggaran dan Realisasi	Persentase Selisih Penyerapan	Persentase Penyerapan Anggaran
2020	Rp. 52.470.733.000	Rp. 52.121.708.052	Rp. 349.024.948	0,67%	99,33%
2021	Rp. 55.686.083.000	Rp. 49.634.302.245	Rp. 6.051.780.245	10,87%	89,13%
2022	Rp. 70.502.414.000	Rp. 64.490.285.713	Rp. 6.012.128.287	8,53%	91,47%
2023	Rp. 78.352.600.000	Rp. 65.788.099.253	Rp. 12.564.500.747	16,04%	83,96%
2024	Rp. 76.588.739.000	Rp. 59.839.047.471	Rp. 16.749.691.529	21,87%	78,13%

Berdasarkan data Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan realisasi biaya produksi selama periode tahun 2020–2024, diketahui bahwa penyerapan anggaran tidak maksimal karena selisih lebih kecil dari 100%. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi biaya produksi pada setiap tahun pengamatan, dengan nilai selisih yang cenderung meningkat pada periode 2023 dan 2024

KAJIAN TEORI

Akuntansi Pertanggungjawaban

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem akuntansi manajemen yang dirancang untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi keuangan berdasarkan pusat-pusat pertanggungjawaban dalam organisasi. Sistem ini bertujuan untuk menilai kinerja setiap unit organisasi sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada manajer (Mulyadi, 2016).

Syarat – Syarat Akuntansi Pertanggungjawaban

Dalam penerapannya, akuntansi pertanggungjawaban harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat terlaksana dengan baik. Menurut (Mulyadi, 2016:218) ada 5 (lima) penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang memadai yaitu :

1. Struktur Organisasi

Dalam akuntansi pertanggungjawaban struktur organisasi harus menggambarkan aliran tanggungjawab, wewenang, dan posisi yang jelas untuk setiap unit kerja dari setiap tingkat manajemen.

2. Anggaran

Setiap pusat pertanggungjawaban dalam akuntansi pertanggungjawaban harus turut serta dalam penyusunan anggaran.

3. Penggolongan Biaya

Penggolongan biaya ke dalam kategori biaya terkendalikan dan tidak terkendalikan perlu dilakukan dalam akuntansi pertanggungjawaban, karena manajer tidak dapat mengendalikan semua biaya yang terjadi di dalam satu bagian.

4. Sistem Akuntansi Biaya

Setiap tingkat manajemen dalam perusahaan merupakan pusat biaya dan akan dibebani dengan biaya-biaya yang terjadi didalamnya yang dipisahkan antara biaya terkendalikan dan biaya tidak terkendalikan.

5. Sistem Pelaporan Biaya

Bagian akuntansi biaya setiap bulannya membuat laporan pertanggungjawaban untuk setiap pusat-pusat biaya yang isi laporan tersebut akan disesuaikan dengan tingkatan manajemen yang akan menerimanya.

Pengendalian Biaya

Menurut Supriyono (2018), pengendalian biaya bertujuan untuk memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan tidak melebihi anggaran serta digunakan secara efisien. Dalam perusahaan manufaktur atau perkebunan, pengendalian biaya produksi sangat penting karena biaya produksi merupakan komponen utama dalam kegiatan operasional.

METODE

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan Kualitatif, Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif mengidentifikasi struktur orfganisasi dan pusat pertanggungjawaban, menganalisis anggaran biaya produksi, menghitung anggaran biaya produksi yang tidak terserap, menganalisis sistem penggolongan dan pencatatan biaya, menganalisis sistem pelaporan biaya pertanggungjawaban, menganalisis hasil wawancara dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anggaran dan realisasi biaya produksi tahun 2020, total anggaran sebesar Rp52.470.733.000 dengan realisasi Rp52.121.708.052, sehingga terdapat selisih sebesar Rp349.024.948 yang menunjukkan realisasi lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan. Persentase selisih sebesar 0,67% dengan tingkat penyerapan anggaran 99,33%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pengendalian biaya produksi telah berjalan dengan baik karena realisasi biaya masih berada dalam batas anggaran. Anggaran dan realisasi biaya produksi tahun 2021, total anggaran sebesar Rp55.686.083.000 dengan realisasi Rp49.634.302.245, sehingga terdapat selisih sebesar Rp6.051.780.755. Persentase selisih sebesar 1,15% dengan tingkat penyerapan anggaran 98,85%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan realisasi biaya produksi masih berada dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, sehingga pengendalian biaya dapat dikatakan berjalan cukup baik. Anggaran dan realisasi biaya produksi tahun 2022, anggaran sebesar Rp70.502.414.000 dengan realisasi Rp64.490.285.713, sehingga terdapat selisih sebesar Rp6.012.128.287. Persentase selisih sebesar 9,92% dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 90,08%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan realisasi biaya produksi lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan, sehingga penggunaan biaya masih berada dalam batas yang direncanakan.

Anggaran dan realisasi biaya produksi tahun 2023, anggaran sebesar Rp78.352.600.000 dengan realisasi Rp65.788.099.253, sehingga terdapat selisih sebesar Rp12.564.500.747. Persentase selisih sebesar 16,01% dengan tingkat penyerapan anggaran 83,99%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan realisasi biaya produksi lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan, sehingga penggunaan biaya masih berada dalam batas perencanaan. Laporan anggaran dan realisasi biaya produksi tahun 2024, anggaran sebesar Rp76.588.739.000 dengan realisasi Rp59.839.047.471, sehingga terdapat selisih sebesar Rp16.749.691.529. Persentase selisih sebesar 22,00% dengan tingkat penyerapan anggaran 78,00%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan realisasi biaya produksi jauh lebih rendah dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan, sehingga penggunaan biaya belum terserap secara optimal sesuai perencanaan.

Pembahasan

Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Unit Kebun Bah Birong Ulu

Anggaran sebesar Rp76.588.739.000 dengan realisasi Rp59.839.047.471, sehingga terdapat selisih sebesar Rp16.749.691.529. Persentase selisih sebesar 22,00% dengan tingkat penyerapan anggaran 78,00%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan realisasi biaya produksi jauh lebih rendah dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan, sehingga penggunaan biaya belum terserap secara optimal sesuai perencanaan. Menurut (Mulyadi, 2018) “mengemukakan bahwa akuntansi pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan baik jika didukung oleh syarat syarat yaitu adanya struktur organisasi, anggaran, penggolongan biaya, sistem akuntansi biaya, sistem pelaporan biaya”. PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Unit Kebun Bah Birong Ulu sudah menerapkan syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban secara dengan baik. Dilihat dari syarat yang pertama yaitu struktur organisasi. Berdasarkan hasil wawancara, perusahaan telah memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi secara resmi. Pembagian tugas dan tanggung jawab pada bagian produksi disesuaikan dengan *job description* masing-masing jabatan. Selain itu, disebutkan bahwa asisten tata usaha bertanggung jawab atas pengendalian biaya produksi. Adanya pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah menetapkan pusat-pusat pertanggungjawaban secara jelas. Setiap manajer atau kepala bagian memiliki kewenangan dalam mengendalikan biaya sesuai dengan tanggung jawabnya. Kondisi ini mendukung penerapan akuntansi pertanggungjawaban karena memungkinkan manajemen mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan biaya produksi. Syarat kedua dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban adalah adanya anggaran yang disusun sebagai pedoman dalam proses perencanaan dan pengendalian biaya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, perusahaan menyusun anggaran biaya produksi secara periodik. Karakteristik penyusunan anggaran tersebut menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan pendekatan partisipatif (*bottom-up budgeting*), di mana setiap pusat biaya yang terlibat dalam kegiatan operasional diberikan kewenangan untuk menyusun anggaran sesuai dengan tanggung jawabnya. Proses penyusunan anggaran melibatkan kepala kerja pada masing-masing bagian serta karyawan yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang penganggaran.

Syarat ketiga yaitu penggolongan biaya, biaya harus dikelompokkan menjadi biaya yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan agar evaluasi kinerja dapat dilakukan secara adil. Berdasarkan hasil wawancara, perusahaan telah mengklasifikasikan biaya produksi menjadi biaya terkendali dan tidak terkendali. Salah satu contoh biaya terkendali yang disebutkan adalah biaya pemeliharaan tanaman. Manajer produksi memiliki kewenangan dalam mengendalikan biaya tertentu sesuai tanggung jawabnya. Sedangkan untuk biaya yang tidak dapat dikendalikan, perusahaan tetap meminta adanya pertanggungjawaban dan penjelasan apabila terjadi penggunaan biaya tersebut. Dengan adanya pemisahan ini, perusahaan dapat menilai kinerja berdasarkan biaya yang memang berada dalam kendali masing-masing bagian.

Syarat keempat adalah sistem akuntansi biaya Berdasarkan hasil wawancara, perusahaan telah memiliki sistem pencatatan biaya produksi yang terstruktur. Proses pencatatan dilakukan melalui aplikasi SAP, yang menunjukkan bahwa sistem akuntansi biaya telah menggunakan sistem komputerisasi. Penggunaan aplikasi tersebut memudahkan dalam pencatatan, pengelompokan, dan pelacakan biaya produksi secara sistematis. Selain itu, setiap jenis biaya produksi telah memiliki kode akun tersendiri. Adanya kode akun khusus ini menunjukkan bahwa biaya telah diklasifikasikan secara jelas sesuai dengan jenis dan pusat pertanggungjawabannya. Hal ini penting dalam akuntansi pertanggungjawaban, karena memungkinkan biaya ditelusuri berdasarkan bagian yang bertanggung jawab. Pencatatan dan pelaporan biaya juga dilakukan secara berkala. Sistem yang digunakan mampu menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasi biaya produksi. Dengan demikian, manajemen dapat mengetahui jumlah biaya yang telah digunakan serta sisa anggaran yang masih tersedia. Berdasarkan wawancara tersebut, sistem akuntansi biaya di perusahaan telah mendukung penerapan akuntansi pertanggungjawaban, karena mampu menyediakan informasi biaya yang akurat dan terstruktur sebagai dasar pengendalian biaya produksi. Syarat kelima adalah sistem pelaporan biaya. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa perusahaan secara rutin menyusun laporan realisasi biaya produksi. Laporan tersebut memuat perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi biaya yang terjadi. Perbandingan ini memungkinkan manajemen untuk melihat apakah penggunaan biaya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, perusahaan juga melakukan analisis atas perbedaan antara anggaran dan realisasi (analisis varians). Apabila terdapat selisih yang signifikan, manajer yang bertanggung jawab diminta memberikan penjelasan terkait penyebab terjadinya perbedaan tersebut.

Peran akuntansi pertanggungjawaban pada PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Unit Kebun Bah Birong Ulu sebagai alat pengendali biaya produksi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan pada PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Unit Kebun Bah Birong Ulu dapat dikatakan telah berperan sebagai alat pengendalian biaya produksi. Hal ini dapat dianalisis melalui pemenuhan unsur-unsur akuntansi pertanggungjawaban serta keterkaitannya dengan mekanisme pengendalian biaya produksi di perusahaan. Secara teoritis, menurut (Mulyadi, 2016), akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem akuntansi yang disusun berdasarkan pusat-pusat pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan untuk mengendalikan biaya melalui penetapan anggaran sebagai standar, pencatatan realisasi biaya,

serta penyusunan laporan pertanggungjawaban. Suatu sistem dikatakan berfungsi sebagai alat pengendalian apabila terdapat proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, dapat ditegaskan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Unit Kebun Bah Birong Ulu telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam teori, khususnya dalam hal pembentukan pusat pertanggungjawaban, penyusunan anggaran sebagai standar biaya, penggolongan biaya, pencatatan biaya secara sistematis, serta penyusunan laporan realisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Keberadaan anggaran biaya produksi yang tidak terserap bukan semata-mata menunjukkan kelemahan dalam sistem, melainkan menjadi informasi penting dalam proses pengendalian manajemen. Melalui perbandingan antara anggaran dan realisasi, manajemen memperoleh dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan perencanaan biaya produksi pada periode berikutnya. Akuntansi pertanggungjawaban tidak hanya berfungsi sebagai sistem pencatatan biaya, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian yang mendukung efektivitas pengelolaan biaya produksi di perusahaan

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut Penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Unit Kebun Bah Birong Ulu telah berjalan dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam teori, yaitu adanya struktur organisasi yang menunjukkan pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas, penyusunan anggaran biaya produksi sebagai dasar perencanaan, penggolongan biaya ke dalam biaya terkendali dan tidak terkendali, sistem akuntansi biaya yang mendukung proses pencatatan dan pengelompokan biaya produksi, serta penyusunan laporan realisasi biaya sebagai bentuk pertanggungjawaban masing-masing bagian. Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa secara sistem, perusahaan telah menerapkan akuntansi pertanggungjawaban dalam kegiatan operasionalnya. Akuntansi pertanggungjawaban telah berperan sebagai alat pengendalian biaya produksi melalui penggunaan anggaran sebagai standar biaya dan dasar pengawasan terhadap realisasi. Perbandingan antara anggaran dan realisasi biaya produksi memberikan informasi mengenai tingkat penggunaan biaya dalam setiap periode. Meskipun masih terdapat anggaran biaya produksi yang tidak terserap, kondisi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam proses perencanaan dan pengendalian biaya produksi selanjutnya. Dengan demikian, sistem akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan telah mendukung fungsi pengendalian biaya produksi dalam perusahaan..

REFERENSI

- Ahmad, & Abdullah. (2017). Pengendalian Manajemen dalam Organisasi. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*.
- Astuty, W. (2017). akuntansi manajemen. *Perdana Publishing*.
- Blocher, E. J., Stout, D. E., & Cokins, G. (2019). *Cost Management: A Strategic Emphasis* (8th (ed.)). McGraw-Hill Education.
- Fauzi. (2023). Peran Anggaran dalam Strategi Alokasi Sumber Daya dan Pengambilan Keputusan. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*.
- Garrison, R. H., Noreen, E. W., & Brewer, P. C. (2021). *Managerial Accounting*. McGraw-

Hill Education.

- Hafsah, H & Hanum, Z. (2023). Penerapan Akuntansi Pertanggung Jawaban Sebagai Alat Penilaian Kinerja Manajer Pusat Pendapatan Pada PT. Perkebunan Nusantara Medan. *Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Tantangan Pendidikan Tinggi Menuju Dudi Melalui Merdeka Belajar*, 4(1), 313–330.
- Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2018). *Cost Management: Accounting and Control*. Cengage Learning.
- Harahap, S. H., Rahmasari, S., & Purnama, N. I. (2025). Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi. *RIGGS: Journal of AI & Digital Business*.
- Mulyadi. (2016). *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa* (6th (ed.)). Salemba Empat.
- Mulyadi. (2018). *Sistem Akuntansi Biaya*. Penerbit Akademik.
- Nasution. (2021). *Anggaran Biaya Produksi*. Penerbit Akademik.
- Parulian, & Sasongko. (2015). Tujuan dan Manfaat Anggaran. *Jurnal Akuntansi*.
- Rachmina, & Sari. (2017). Konsep Biaya Terkendali dalam Sistem Pengendalian Manajemen. *Jurnal Akuntansi*.
- Rosliyati, & Rahayu. (2018). Karakteristik Anggaran dalam Sistem Pengendalian Manajemen. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*.
- Rudianto. (2017). *Akuntansi Manajemen*. Erlangga.
- Sanjaya, & Harahap. (2016). Evaluasi Kinerja Organisasi. *Jurnal Manajemen*.
- Sari, et al. (2025). Anggaran Biaya Produksi Berbasis Data Historis dan Pengaruhnya terhadap Efektivitas Pengendalian Biaya. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1–15.
- Sembiring, M. & C. (2024). Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Controlling Biaya. *Doi.Org/Jebma.V4n3.4860*, 4(1), 2193–2202.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Akuntansi Manajemen*. Pustaka Baru Press.
- Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi Manajemen: Perencanaan dan Pengendalian Biaya* (3rd (ed.)). BPFE-Yogyakarta.
- Tandaju, & al., et. (2022). Anggaran sebagai Alat Pengendalian Manajemen. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.